

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dari nilai koefisien determinasi pada hasil estimasi maka variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara mampu dijelaskan oleh variabel-variabel pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu dijelaskan dengan model yang digunakan.
2. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis. Variabel tingkat pengangguran dan variabel pengeluaran rutin pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pendapatan perkapita dan variabel pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara.
3. Besarnya nilai koefisien variabel-variabel yang menjelaskan variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, yang terbesar adalah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diikuti

berturut-turut oleh variabel pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan pemerintah.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan mampu memiliki terobosan baru serta menemukan inovasi baru dalam mencari sumber-sumber keuangan lain yang dimiliki yaitu dengan memberikan kemudahan dan regulasi kebijakan yang mampu memberikan akses dan fasilitas dalam rangka meningkatkan perekonomian yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita sehingga pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pengkajian terhadap perbelanjaan selayaknya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan pengeluaran rutin pemerintah yang cukup tinggi, salah satu sektor yang memungkinkan untuk itu adalah pos belanja pegawai khususnya belanja gaji tenaga honorer. Tenaga honorer dalam keberadaannya membutuhkan rasionalisasi ulang, tenaga honorer yang dipandang hanya membebani anggaran dapat dilakukan pembinaan dan penataan ulang melalui suatu program tertentu untuk kemudian disalurkan kepada dunia usaha baik didalam maupun diluar kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selayaknya mendorong dan membina penduduk usia produktif untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan mendirikan balai-balai latihan kerja, pusat-pusat pendidikan dan pelatihan serta memberikan kemudahan akses dan fasilitas dalam bentuk

regulasi dan kebijakan yang mendorong penduduk untuk mampu dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki diharapkan akan mampu memasuki pasar tenaga kerja, tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selayaknya dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam pos-pos pengeluaran baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin bersifat transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta mampu menyeimbangkan antara pos-pos penerimaan dan pengeluaran sehingga akan terwujud pembangunan di semua sektor dan mampu mendongkrak perekonomian rakyat menjadi lebih baik.
5. Meningkatkan pergerakan sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor perkebunan dan sektor lainnya yang mampu mendongkrak perekonomian daerah, pemerintah harus menjadi poros solusi dengan segala kewenangannya atas kendala yang dihadapi karena produksi dari sektor perkebunan dan sektor lainnya akan menambah penerimaan daerah dari bagi hasil royalti dan dengan sendirinya kontribusi dana bagi hasil atas belanja pemerintah dapat lebih ditingkatkan. Dengan terserapnya tenaga kerja yang maksimal akan meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan penduduk miskin.
6. Kepada peneliti lainnya disarankan untuk mempertimbangkan atau menambah determinan lain kemiskinan, klasifikasi yang lebih komprehensif dan perluasan penelitian baik dari segi objek maupun runtut waktu penelitian.